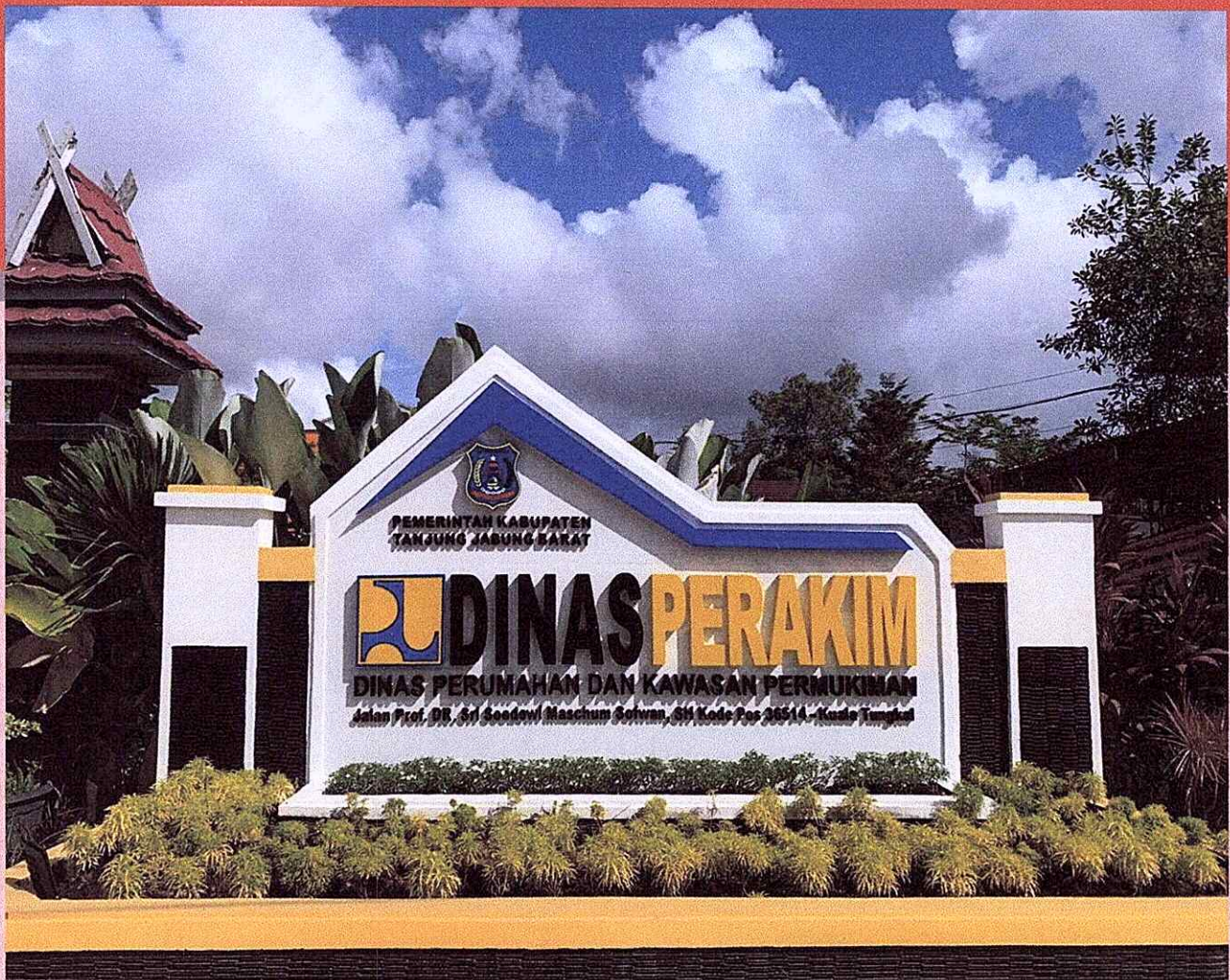




RENJA
TAHUN ANGGARAN
2026



DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga kami dapat Menyusun Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja ini bisa dipedomani dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2026. Namun demikian jika dalam perjalanannya terjadi proses rasionalisasi anggaran, yang berujung pada penurunan jumlah program atau kegiatan maka akan dilakukan penyesuaian berupa penundaan/pengurangan program atau kegiatan yang memiliki bobot yang lebih rendah.

Selanjutnya ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada semua pihak dengan harapan pelaksanaan nanti senantiasa diberikan kelancaran dan dapat diwujudkan serta memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada akhirnya kami berharap agar Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi pegawai di lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing dalam upaya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.

Kuala Tungkal, 30 Desember 2025

**KEPALA DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

H. SYAFRUL, ST
Pembina Tingkat I/IV b
NIP. 19821126 201001 1 015

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I: PENDAHULUAN	
Latar Belakang	1
Landasan hukum	2
Maksud dan Tujuan	5
Sistematika Penulisan	6
BAB II: EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN PREDIKSI TAHUN BERJALAN	
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025.....	7
Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Berjalan (Tahun Anggaran 2026)	12
Analisis Kinerja Pelayanan SKP	18
Isu-isu	19
Review Terhadap Rancangan RKPD	25
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	27
BAB III: TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	28
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat.....	28
Program dan Kegiatan	34
BAB IV: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	45
BAB V: PENUTUP	46

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Pemerintah sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Serta mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Renja OPD disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rencana Kerja Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rancangan Akhir Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) yang berisi informasi rencana program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh OPD dalam satu tahun anggaran. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PERAKIM) Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah satu-satunya Unit Organisasi yang bertanggung jawab di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman maka dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan kinerja perlu disusun Rencana Kinerja (Renja) organisasi. Dengan tersusunnya Rencana

Kinerja ini diharapkan setiap aparat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat lebih mampu meningkatkan kinerjanya. Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 ini dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029. Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Tahun 2026 memperhatikan prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD KabupatenTanjab Barat Tahun 2025-2029 dan menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan Rencana Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjab Barat ke depan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perangkat Daerah, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses Pembangunan Daerah Di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat berjalan secara partisipatif, koordinatif, sinergis dan komprehensif serta tersusun secara sistematis sehingga mengarah pada visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 9. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tetntang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rancangan Akhir Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
12. Permendagri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
17. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9001-2850 Tahun 2025 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
19. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 01/PRT/M/2014 tentang standar pelayanan minimal Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2026 adalah dengan dokumen perencanaan pembangunan sarana dan prasarana bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang akan menjadi pedoman dan arah kebijakan yaitu :

- ❖ Memberikan gambaran tentang kondisi sarana dan prasarana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman .
- ❖ Sebagai acuan bagi aparat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan.
- ❖ Sebagai titik dalam mengukur kinerja dan akuntabilitas kinerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung barat.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk:

- ❖ Merencanakan dan melakukan perubahan strategis.
- ❖ Memelihara, mengelola dan memanfaatkan keberhasilan yang telah dicapai.
- ❖ Menciptakan keterpaduan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebaga wujud pertanggung jawaban dalam mencapai visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- ❖ Memberikan pedoman, alat pengenaladi Kinerja dalam pelaksanaan program dan Kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2026.
- ❖ Sebagai panduan dalam melaksanakan program dan kegiatan Pembangunan di Bidang Perumahan dan Bidang Kawasan Permukiman di Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama satu tahun kedepan.
- ❖ Perumusan tujuan dan sasaran Dinas PERAKIM tahun 2026

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Dinas PERAKIM Tahun 2026 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2025 DAN PELAKSANAAN TAHUN 2025

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025
- 2.2 Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2026
- 2.3 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.5 Review Terhadap RancanganS RKPD
- 2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan
- 3.4 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN PREDIKSI TAHUN BERJALAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025

Pelaksanaan program yang telah dilaksanakan pada tahun yang lalu dalam melaksanakan tugas telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang disusun dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Dengan demikian program/kegiatan telah dilaksanakan dengan hasil yang baik meskipun untuk tahun mendatang perlu ditingkatkan lagi agar sesuai dengan harapan. Adapun pelaksanaan program dan kegiatan yang telah berhasil dilaksanakan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan ditinjau dari Pelaksanaan Kegiatan
Tahun 2025

NO.	Uraian		Sudah / Belum mencapai Target
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
1	Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase Realisasi	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp.36,204,000,- Rp.28,064,000,- 81.153%	
2	Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase Realisasi	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp.3,256,335,716,- Rp.2,650,550,645,- 82%	
3	Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase Realisasi	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Rp.870,680,000,- Rp.683,445,000,- 79%	
4	Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase Realisasi	Pegadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya Rp. 235,553,630- Rp. 46,065,000,- 20 %	
5	Sub Kegiatan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	

	Anggaran Realisasi Persentase Realisasi	Rp. 90,000,000,- Rp. 80,000,000,- 95%	
6	Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase Realisasi	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Rp.8,990,000,- Rp. 8,472,000,- 94%	
7	Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase Realisasi	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp.187,442,000,- Rp.141,209,500,- 76 %	
8	Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase Realisasi	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp.22,500,000,- Rp.10,375,000,- 46%	
9	Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase Realisasi	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan Rp. 128,850,000,- Rp. 86,886,200,- 68%	
10	Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase Realisasi	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp.18,000,000,- Rp.4,250,000,- 24%	
11	Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase Realisasi	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp. 704,072,200,- Rp. 500,711,100,- 71%	
12	Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase Realisasi	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp. 10,000,000,- Rp. 8,500,000,- 85%	
13	Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase Realisasi	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik Rp. 12,764,000,000,- Rp. 10,765,617,800,- 84%	
14	Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase Realisasi	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp. 2,054,200,000,- Rp. 1,724,030,848,- 85%	
15	Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase Realisasi	Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan,dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Rp. 98,100,000,- Rp. 19,656,200,- 20%	
16	Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase Realisasi	Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan,dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Lapangan Rp.433,275,000,- Rp.234,215,000,- 51%	

17	Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase Realisasi	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp.71,920,000,- Rp. 45,727,601,- 66%	
18	Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase Realisasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp.856,795,000,- Rp.207,719,500,- 25%	
19	Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase Realisasi	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp.0,- Rp.0,- 0%	
Program : Pengembangan Perumahan			
20	Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase Realisasi	Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana Rp.316,060,000,- Rp.316,000,000,- 100%	
21	Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase Realisasi	Fasilitasi Penyediaan Rumah Bagi Korban Bencana Kab/Kota Rp.64,000,000,- Rp.0,- 0%	
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas			
22	Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase Realisasi	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Rp. 10,264,900,000,- Rp. 7,418,699,655,- Rp. 73%	
23	Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase Realisasi	Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Rp.176,605,990,410,- Rp.125,428,963,366,- 72%	
24	Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase Realisasi	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang Rp.73,650,000,- Rp.29,900,000,- 51%	
25	Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase Realisasi	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Rp 13,480,000,- Rp.0,- 0%	
Program Kawasan Permukiman			
26	Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase Realisasi	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Rp. 256,500,000,- Rp 176,175,000,- 70%	

27	Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase Realisasi	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Rp. 800,000,000,- Rp 795,668,70,- 100%	
28	Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase Realisasi	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Rp. 4,270,400,000,- Rp. 4,054,000,000,- 97%	
29	Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase Realisasi	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Rp. 800,000,000,- Rp. 495,948,000,- 63%	
30	Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase Realisasi	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh Rp. 14,042,478,000,- Rp. 10,033,270,618,- 72%	
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh			
31	Sub Kegiatan Anggaran Realisasi Persentase Realisasi	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 Ha Rp. 5,206,010,000,- Rp. 1,901,800,000,- 98%	

Review atas pelaksanaan program dan kegiatan diatas adalah pelaksanaan program/kegiatan sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 .Adapun persentase realisasi secara keseluruhan adalah sebesar 72%.

**2.2 Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Berjalan
(Tahun Anggaran 2026)**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RENCANA TAHUN 2025			
		LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
2	3	4	5	6	7
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			12 Bulan	18.509.000.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, nilai Akip B		100%	31.450.000,	APDB
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		7 Laporan	31.450.000,	APDB
Administrasi keuangan perangkat daerah	Tingkat pemenuhan Dokumen Administrasi Laporan Keuangan Tahunan OPD		100%	3.558.890.113	APDB
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		30 Orang/Bulan	3.265.130.113	APDB
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		30 Dokumen	293.760.000	APDB
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perkantoran	Dinas Perkim	100%	482.493.200,	APDB
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bnagunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		12 paket	4.465.000	APDB
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 paket	78.620.000	APDB
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 paket	13.500.000	APDB

Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		12 dokumen	59.026.000,	APDB
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12 Dokumen	30.000.000,	APDB
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		360 Laporan	296.882.200	APDB
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	Dinas Perkim	100%	14.735.936.000	APBD
Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	5.000.000	APBD
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	12.899.000.000	APBD
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	1.831.936.000	APBD
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan barang Milik Daerah yang dipelihara	Dinas Perkim	100%	651.750.000	APBD
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		27 Unit	109.350.000,	APBD
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		27 Unit	478.530.000,	APBD
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		60 Unit	63.870.000	APBD
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah layak Huni untuk Korban Bencana	Dinas Perkim	100%	167.900.000	APBD
	persentase Rumah layak Huni untuk relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah	Dinas Perkim	100%		
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah KorbanBencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersedianya Rumah Layak huni bagi korban bencana	Dinas Perkim	10 Unit Rumah	167.900.000	APBD
	,Tersedianya Rumah Layak huni bagi relokasi program kabupaten/kota				
Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	13 Kecamatan	1 Unit	150.000.000	APBD
Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah		2 Rumah Tangga	7.900.000	

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase berkurangnya kawasan permukiman kumuh	Dinas Perkim	10%	1.157.700.000,	APBD
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase peningkatan kualitas kawasan kumuh	Dinas Perkim	10%	1.157.700.000,	
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	13 Kecamatan	75 Unit Rumah	1.157.700.000,	APBD
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Penurunan RTLH di luar Kawasan Kumuh	Dinas Perkim	3%	1.875.100.000	
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tidak Layak huni menjadi Rumah Layak huni	Dinas Perkim	150 unit	1.875.100.000	
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	13 kecamatan	150 unit rumah	1.875.100.000	APBD
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	cakupan peningkatan PSU	Dinas Perkim	100%	3.801.123.060,	
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase penyelenggaraan PSU perumahan	Dinas Perkim	100%	3.801.123.060,	
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	13 Kecamatan	1500 Lokasi	3.801.123.060,	
				26.462.342.373	

2.3 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Tanjung Jabung Barat dapat dilihat dari tabel T-C.30

2.4 Isu-isu

Reformasi birokrasi baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Reformasi birokrasi pada tatanan Pemerintah Daerah diarahkan untuk mewujudkan implementasi otonomi daerah dengan tujuan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, demokrasi, keadilan dan pemerataan. Dalam penyelenggaraan pemerintah termasuk penyelenggaraan pemerintah daerah salah satu elemen strategis adalah kelembagaan disamping urusan, sumberdaya aparatur dan elemen pendukung lainnya.

Kelembagaan perangkat Daerah dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ditetapkan dalam pasal 120 sampai dengan pasal 128, yang mengamanatkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencanaan yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah.

Memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut memuat hal – hal pokok tentang organisasi perangkat daerah.

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Untuk melaksanakan tugas pokok di atas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang perumahan dan bidang kawasan permukiman;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan bidang kawasan permukiman;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan dan bidang kawasan permukiman;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perumahan dan bidang kawasan permukiman; dan
- e. fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan Tipe C terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 2 (dua) Bidang. Dalam sekretariat terdiri atas 2 jabatan Struktural yakni Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program serta Kasubbag Umum dan Kepegawaian. Selanjutnya untuk setiap Bidang terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas dan Kawasan Permukiman.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas sekretariat mempunyai fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja;
- b. pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, dan kearsipan;
- c. pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi: perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program;
- 2) Sub Bagian Umum dan Keuangan.

2. Kassubag Umum dan Keuangan

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, kehumasan, ketatalaksanaan, serta urusan keuangan. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan keuangan;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan keuangan;
- b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- c. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
- d. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- e. melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, masyarakat;
- f. dan hubungan melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan satuan;
- g. melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset dan perlengkapan, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan aset satuan;
- h. melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan;
- i. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

3. Subbagian Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan Program

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program .

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;
- b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran;
- c. melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari bidang-bidang untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja;
- d. melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan anggaran meliputi anggaran APBD, APBN, PHLN baik kabupaten, provinsi dan pusat secara lintas program;
- f. melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

4. Bidang Perumahan

Bidang Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, pendataan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Bidang Perumahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang perumahan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengembangan perumahan meliputi penyediaan perumahan terkena relokasi, penyediaan dan rehabilitasi perumahan korban bencana, menyiapkan kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun;
- c. penyiapan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembiayaan perumahan meliputi skema bantuan pembiayaan pembangunan perumahan, dan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni;
- d. penyiapan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pendataan dan pengendalian perumahan meliputi penerbitan izin pembangunan pengembangan perumahan dan penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG); dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Kawasan Permukiman

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, pelaksanaan kebijakan, melaksanakan pembangunan, penanganan,

pencegahan, pengembangan, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kawasan permukiman.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Bidang Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang kawasan permukiman;
- b. penyiapan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, koordinasi, pemantauan dan evaluasi prasarana dan sarana utilitas umum meliputi pembangunan sarana prasarana utilitas umum, sertifikasi dan registrasi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan utilitas umum tingkat kemampuan kecil;
- c. penyiapan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan kawasan permukiman kumuh meliputi penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dan pencegahan perumahan permukiman kumuh;
- d. penyiapan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengembangan kawasan permukiman meliputi pengembangan kawasan permukiman dan rekomendasi izin pembangunan pengembangan kawasan permukiman; dan
- e. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.5 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Rancangan Akhir RKPD dengan hasil analisis kebutuhan tidak berbeda.

2. Rumusan program dan kegiatan baru yang terdapat di Rancangan RKPD atau program dan kegiatan cocok beserta besarannya

Tabel Review terhadap Rencana Kerja RKPD Tahun 2026 dituangkan pada Tabel T-C.31;

TABEL T-C.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

1.01.04.01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	8
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Dinas Perkim	12 Bulan	19,460,519,313	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Dinas Perkim	12 Bulan	19,460,519,313	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, nilai Akip B	Dinas Perkim	100%	31,450,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, nilai Akip B	Dinas Perkim	100%	31,450,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas Perkim	7 Laporan	31,450,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas Perkim	7 Laporan	31,450,000	
	Administrasi keuangan perangkat daerah	Tingkat pemenuhan Dokumen Administrasi Laporan Keuangan Tahunan OPD	Dinas Perkim	100%	3,558,890,113	Administrasi keuangan perangkat daerah	Tingkat pemenuhan Dokumen Administrasi Laporan Keuangan Tahunan OPD	Dinas Perkim	100%	3,558,890,113	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perkim	30 orang/bulan	3,265,130,113	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perkim	30 orang/bulan	3,265,130,113	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Perkim	30 dokumen	293,760,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Perkim	30 dokumen	293,760,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perkantoran	Dinas Perkim	100%	482,493,200	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perkantoran	Dinas Perkim	100%	482,493,200	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan	Dinas Perkim	12 Paket	4,465,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan	Dinas Perkim	12 Paket	4,465,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	8
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Dinas Perkim	12 Paket	78,620,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Dinas Perkim	12 Paket	78,620,000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Dinas Perkim	12 Paket	13,500,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Dinas Perkim	12 Paket	13,500,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Dinas Perkim	12 Paket	59,026,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Dinas Perkim	12 Paket	59,026,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang disediakan	Dinas Perkim	12 Dokumen	30,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang disediakan	Dinas Perkim	12 Dokumen	30,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Perkim	360 Laporan	296,882,200	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Perkim	360 Laporan	296,882,200	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	Dinas Perkim	100%	14,735,936,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	Dinas Perkim	100%	14,735,936,000	
	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Perkim	12 Laporan	5,000,000	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Perkim	12 Laporan	5,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Dinas Perkim	12 Laporan	12,899,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Dinas Perkim	12 Laporan	12,899,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Dinas Perkim	12 Laporan	1,831,936,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Dinas Perkim	12 Laporan	1,831,936,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan barang Milik Daerah yang dipelihara	Dinas Perkim	100%	651,750,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan barang Milik Daerah yang dipelihara	Dinas Perkim	100%	651,750,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan	Dinas Perkim	27 unit	109,350,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan	Dinas Perkim	27 unit	109,350,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Dinas Perkim	27 Unit	478,530,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Dinas Perkim	27 Unit	478,530,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Dinas Perkim	60 Unit	63,870,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Dinas Perkim	60 Unit	63,870,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	8
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah layak Huni untuk Korban Bencana	Dinas Perkim	100%	167,900,000	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah layak Huni untuk Korban Bencana	Dinas Perkim	100%	167,900,000	
		persentase Rumah layak Huni untuk relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah	Dinas Perkim	100%			persentase Rumah layak Huni untuk relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah	Dinas Perkim	100%		
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersedianya Rumah Layak Huni bagi korban Bencana atau relokasi program kabupaten	Dinas Perkim	10 Unit	167,900,000	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersedianya Rumah Layak Huni bagi korban Bencana atau relokasi program kabupaten	Dinas Perkim	10 Unit	167,900,000	
		Tersedianya Rumah Layak huni bagi relokasi program kabupaten/kota					Tersedianya Rumah Layak huni bagi relokasi program kabupaten/kota				
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	jumlah rumah bagi korban bencana kabupaten/kota yang terbangun	13 Kecamatan	1 Unit	150,000,000	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	jumlah rumah bagi korban bencana kabupaten/kota yang terbangun	13 Kecamatan	1 Unit	150,000,000	
	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah		2 Rumah Tangga	17,900,000	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	2 Rumah Tangga		17,900,000	
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase berkurannya kawasan permukiman	Dinas Perkim	10%	1,157,700,000	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase berkurannya kawasan permukiman	Dinas Perkim	10%	1,157,700,000	
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase peningkatan kualitas kawasan kumuh	Dinas Perkim	100	1,157,700,000	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase peningkatan kualitas kawasan kumuh	Dinas Perkim	100%	1,157,700,000	
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	Kecamatan Tungkal Ilir, Merlung, Tebing Tinggi, Kuala Betara, Betara dan Pengabuan	75 Unit	1,157,700,000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	Kecamatan Tungkal Ilir, Merlung, Tebing Tinggi, Kuala Betara, Betara dan Pengabuan	75 Unit	1,157,700,000	
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Penurunan RTLH di luar Kawasan Kumuh	Dinas Perkim	3%	1,875,100,000	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Penurunan RTLH di luar Kawasan Kumuh	Dinas Perkim	3%	1,875,100,000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	8
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tidak Layak huni menjadi Rumah Layak huni	Dinas Perkim	150 Unit Rumah	1,875,100,000	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tidak Layak huni menjadi Rumah Layak huni	Dinas Perkim	150 Unit Rumah	1,875,100,000	
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang diperbaiki	13 kecamatan	150 Unit Rumah	1,875,100,000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang diperbaiki		150 Unit Rumah	1,875,100,000	
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	cakupan peningkatan PSU	Dinas Perkim	100%	3,801,123,060	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase peningkatan PSU	Dinas Perkim	100%	3,801,123,060	
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase penyelenggaraan PSU perumahan	Dinas Perkim	100%	3,801,123,060	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase penyelenggaraan PSU perumahan	Dinas Perkim	100%	3,801,123,060	
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah lokasi perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang menunjang Fungsi Hunian	Kecamatan Batang asam, Bram itam, Muara papalik, Renah mendaluh, Seberang kota, Senyerang, Tungkul ulu	1500 Lokasi	3,801,123,060	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah lokasi perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang menunjang Fungsi Hunian	Kecamatan Batang asam, Bram itam, Muara papalik, Renah mendaluh, Seberang kota, Senyerang, Tungkul ulu	1500 Lokasi	3,801,123,060	
TOTAL PAGU INDIKATIF)					26,462,342,373						26,462,342,373

2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penyusunan Rencana Kerja membutuhkan adanya usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Kota, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kab Tanjab Barat.

Berikut adalah Program dan kegiatan Dinas PERAKIM Kab. Tanjab Barat berdasarkan usulan dari masyarakat atau pemangku kepentingan pada tahun 2026 yang tertuang dalam Tabel T-C.32

TABEL T-C.32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN KEPENTINGAN TAHUN 2026
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

1.01.04.01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RANCANGAN RENCANA KERJA TAHUN 2025				Catatan Penting
			LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Dinas Perkim	12 Bulan	19,460,519,313		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dinas Perkim	100%	31,450,000	APDB	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas Perkim	7 Laporan	42,000,000	APDB	
	Administrasi keuangan perangkat daerah	Tingkat pemenuhan Dokumen Administrasi Laporan Keuangan Tahunan OPD	Dinas Perkim	100%	3,558,890,113	APDB	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perkim	30 orang/bulan	3,900,000,000	APDB	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Perkim	30 dokumen	830,000,000	APDB	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perkantoran	Dinas Perkim	100%	482,493,200	APDB	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan	Dinas Perkim	12 Paket	4,465,000	APDB	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Dinas Perkim	12 Paket	78,620,000	APDB	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Dinas Perkim	12 Paket	13,500,000	APDB	
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang disediakan	Dinas Perkim	12 Paket	59,026,000	APDB	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang disediakan	Dinas Perkim	12 Dokumen	30,000,000	APDB	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Perkim	360 Laporan	296,882,200	APDB	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RANCANGAN RENCANA KERJA TAHUN 2025				Catatan Penting
			LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	Dinas Perkim	100%	14,735,936,000	APBD	
Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Perkim	12 Laporan	5,000,000	APBD	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Dinas Perkim	12 Laporan	12,899,000,000	APBD	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Dinas Perkim	12 Laporan	1,831,936,000	APBD	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan barang Milik Daerah yang dipelihara	Dinas Perkim	100%	651,750,000	APBD	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan	Dinas Perkim	27 unit	109,350,000	APBD	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Dinas Perkim	27 Unit	478,530,000	APBD	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Dinas Perkim	60 Unit	63,870,000	APBD	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah layak Huni untuk Korban Bencana	Dinas Perkim	100%	167,900,000	APBD	
	persentase Rumah layak Huni untuk relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah	Dinas Perkim	100%			
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersedianya Rumah Layak Huni bagi korban Bencana atau relokasi program kabupaten	Dinas Perkim	10 Unit	167,900,000	APBD	
Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah bagi korban bencana kabupaten/kota yang terbangun	13 Kecamatan	1 Unit	150,000,000	APBD	
Facilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang	Dinas Perkim	2 Rumah Tangga	17,900,000	APBD	
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase berkurangnya kawasan permukiman		10%	1,157,700,000	APBD	
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	Kecamatan Tungkal Ilir, Merlung, Tebing Tinggi, Kuala Betara, Betara dan Pengabuan	75 Unit	1,157,700,000		

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RANCANGAN RENCANA KERJA TAHUN 2025				Catatan Penting
			LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Penurunan RTLH di luar Kawasan Kumuh	Dinas Perkim	3%	1,875,100,000		
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tidak Layak huni menjadi Rumah Layak huni	Dinas Perkim	150 Unit Rumah	1,875,100,000		
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang diperbaiki		150 Unit Rumah	1,875,100,000		
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	cakupan peningkatan PSU	Dinas Perkim	100%	3,801,123,060		
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase penyelenggaraan PSU perumahan	Dinas Perkim	100%	3,801,123,060		
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah lokasi perumahan yang disediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang menunjang Fungsi Hunian	Kecamatan Batang asam, Bram itam, Muara papalik, Renah mendaluh, Seberang kota, Senyerang, Tungkal ulu	1500 Lokasi	3,801,123,060	APBD	
TOTAL PAGU INDIKATIF					26,462,342,373		

BAB III**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN****3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional**

Kebijakan nasional Kementerian Umum dan Perumahan Rakyat yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PERAKIM) Kab. Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

- a. Kebijakan Bidang Perumahan
 1. Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan
 2. Penyediaan dan penyediaan rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah kab/kota
 3. Tersedianya Perumahan yang terfasilitasi PSU
- b. Kebijakan Bidang Kawasan Permukiman
 1. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman di kawasan permukiman Kumuh
 2. Meningkatnya cakupan pelayanan Prasarana Sarana dan Utilitas di Kawasan permukiman Kumuh
 3. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

3.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan harus disusun dengan baik guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Dalam upaya mewujudkan visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2025-2029 yaitu

“Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH MADANI”

(Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sesuai dengan tugas dan fungsinya melaksanakan sebahagian urusan Pemerintah Kabupaten Perumahan dan Kawasan Permukiman, menetapkan Visi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Terwujudnya Kawasan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni, Berkualitas dan Berkelanjutan

Adapun Misi dari penjabaran Visi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai Berikut:

1. Mewujudkan Perumahan yang Terjangkau dan Layak Huni
2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Permukiman yang layak Huni dan Produktif melalui Pembinaan dan Fasilitasi Pengembangan Infrastruktur Permukiman yang Terpadu, Handal dan Berkelanjutan

Sedangkan Program-program Prioritas untuk menunjang daripada Misi tersebut di atas anatara lain :

1. Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman
2. Program Peningkatan Kualitas Rumah
3. Program Kota Tanpa Kumuh

Adapun Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu:

Tabel3.1
Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Tujuan	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Bidang	Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Terwujudnya Kawasan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni	Tersedianya Perumahan Layak Huni bagi Masyarakat	1. Persentase Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.520 Unit (E-RTLH)	10%	10%	10%	10%	10%
			2. Persentase Pembangunan/Peningkatan Rumah bagi Korban Bencana	Bidang Perumahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			3. Persentase Penurunan Kawasan permukiman Kumuh	Bidang Kawasan Permukiman	1.508,67 Ha	10%	10%	10%	10%	10%
		Meningkatnya infrastruktur dasar perumahan dan permukiman	4. Persentase Jalan Lingkungan dengan Kondisi Baik	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			5. Persentase lampu Jalan dengan Kondisi Baik	Bidang Perumahan dan Permukiman	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3.3 Program dan Kegiatan

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Tahun 2026 mempunyai beberapa program mengacu pada RENSTRA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029 dan juga RPJMD Tahun 2025 -2029 diantaranya :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengembangan Perumahan
3. Program Kawasan Permukiman
4. Program Perumahan dan Kawasan permukiman Kumuh
5. Program Peningkatan Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Untuk Menunjang program-program diatas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun beberapa Kegiatan untuk Tahun 2026 yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

9. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan rehabilitasi Rumah Korban bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
10. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/kota
11. Penerbitan Izin pembangunan dan pengembangan perumahan
12. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman
13. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10(Sepuluh)Ha
14. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10(Sepuluh)Ha
15. Pencegahan perumahan dan Kawasan permukiman kumuh pada daerah Kabupaten/Kota
16. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
17. Setifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) tingkat kemampuan kecil

Untuk Menunjang Sub Kegiatan diatas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun beberapa Sub Kegiatan untuk Tahun 2026 yaitu :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

5. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
6. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
10. Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan
11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
12. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
13. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
14. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
15. Penyediaan Jasa Surat menyurat
16. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
17. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
18. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
19. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
20. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
21. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
22. Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
23. Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Relokasi Perumahan
24. Sosialisasi tentang mekanisme penggantian hak atas tanah dan bangunan

25. Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan
26. Rehabilitasi Rumah bagi korban bencana
27. Penyusunan site plan dan/atau detail engineering design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota
28. Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana
29. Pembangunan rumah bagi korban bencana
30. Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban atau relokasi program kabupaten/kota
31. Fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan terintegrasi secara elektronik
32. Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan
33. Penyusunan dan/atau review serta legalisasi rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh
34. Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh
35. Survey dan penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh
36. penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
37. Pembentukan/pembinaan kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman kumuh
38. Penyadaraan publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh

39. Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremejaan/pemugaran Permukiman Kumuh
40. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
41. Pelaksanaan pembangunan pemugaran/peremajaan permukiman kumuh
42. Perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha
43. Perencanaan Penyediaan PSU
44. Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
45. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan utilitas Umum Perumahan
46. Verifikasi dan penyerahan PSU permukiman dari pengembang kerjasama penyediaan/pengelolaan PSU Permukiman
47. Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan dengan kualifikasi kecil

Adapun pengelompokan program dan kegiatan yang menunjang Tujuan, sasaran dan indikator kinerja dinas perumahan dan Kawasan permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Program	Kegiatan
1	Terwujudnya Kawasan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni	Tersedianya Perumahan Layak Huni bagi Masyarakat	Persentase Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
				Program Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Hni
				Program Perumahan	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
				Program Perumahan	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
			Persentase Pembangunan/Peningkatan Rumah bagi Korban Bencana	Program Perumahan	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota
2		Meningkatnya infrastruktur dasar perumahan dan permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh	Program Kawasan Permukiman	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh
			Persentase Jalan Lingkungan dengan Kondisi Baik	Program Kawasan Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
			Persentase lampu Jalan dengan Kondisi	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	

**RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2026**

BAB III

No	Tujuan	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Bidang	Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029	Keterangan
1	Terwujudnya Kawasan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni	Tersedianya Perumahan Layak Huni bagi Masyarakat	1. Persentase Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.250 Unit Rumah	10%	10%	10%	10%	10%	$\frac{\text{Rumah Layak Huni Tertangani}}{\text{Jumlah Total Rumah Tidak Layak Huni}} \times 100\%$
			2. Persentase Pembangunan/Peningkatan Rumah bagi Korban Bencana	Bidang Perumahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	$\frac{\text{Rumah Korban Bencana yang tertangani}}{\text{Jumlah Total Korban Bencana}} \times 100\%$
		Meningkatnya infrastruktur dasar perumahan dan permukiman	3. Persentase Penurunan Kawasan permukiman Kumuh	Bidang Kawasan Permukiman	1.508,67 Ha	10%	10%	10%	10%	10%	$\frac{\text{Pengurangan Kawasan Permukiman Kumuh}}{\text{Jumlah Total seluruh Kawasan Permukiman Kumuh}} \times 100\%$
			4. Persentase Jalan Lingkungan dengan Kondisi Baik	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100%	100%	100%	100%	100%	100%	$\frac{\text{Realisasi Jalan Lingkungan yang tertangani}}{\text{Total Jalan Lingkungan}} \times 100\%$
			5.Persentase lampu Jalan dengan Kondisi Baik	Bidang Perumahan dan Permukiman	100%	100%	100%	100%	100%	100%	$\frac{\text{Realisasi lampu jalan yang tertangani}}{\text{Total lampu jalan kabupaten}} \times 100\%$
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					41						

Pada tabel di atas, Target yang akan dicapai pada Tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan dijabarkan di bawah ini.

1. Target indikator Kinerja pada Jumlah Rumah Layak Huni untuk Korban Bencana dan Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah merupakan target yang bersifat urgensi artinya target akan tercapai apabila terdapat Korban bencana yang mengakibatkan kerusakan rumah dan Relokasi rumah akibat dari program pemerintah.
2. Target Indikator Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni bagi MBR merupakan indikator dalam pencapaian rumah layak huni bagi masyarakat. Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat menargetkan 350 unit rumah pertahunnya dengan harapan jumlah Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Tanjung Jabung Barat bisa teratasi, baik dari Dana APBD, Dana Provinsi ataupun Dana Pusat.
3. Target Indikator Kinerja Jumlah Perumahan yang terfasilitasi PSU merupakan penunjang dari pelayanan dasar masyarakat. Target yang akan dicapai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat pertahunnya 100% yang akan terfasilitasi PSU setiap Tahunnya, artinya selama 5 tahun mendatang mencapai 100% Perumahan yang akan terfasilitasi PSU.

4. dan cakupan perumahan yang cukup luas, dinas akan melaksanakan pelayanan dasar tersebut secara bertahap atau periodik.
5. Target Indikator Kinerja capaian pengurangan Kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha setiap tahunnya di targetkan akan berkurang 10% pertahunnya, sehingga pada lima tahun kedepan dinas menargetkan 50% dari kondisi awal sebesar 1.508,67 Ha, artinya pengurangan sebesar 905,202 ha yang ditargetkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6. Target indikator kinerja Jumlah Registrasi dan sertifikasi yang diterbitkan sesuai peraturan/ketentuan dimaksudkan untuk para developer yang akan melakukan pengembangan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tujuan dari target ini adalah agar Dinas mengeluarkan rekomendasi untuk pengembang, sehingga dalam pelaksanaan nantinya pengembang dapat mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman diuraikan pada Tabel TC.33

TABEL T-C.33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

1.01.04.01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RENCANA KERJA TAHUN 2026				Lokasi	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Dinas Perkim	12 Bulan	19,460,519,313	APDB	Dinas Perakim	12 Bulan	19,460,519,313
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, nilai Akip B	Dinas Perkim	100%	31,450,000	APDB	Dinas Perakim	100%	31,450,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dinas Perkim	7 Laporan	31,450,000	APDB		7 Laporan	31,450,000
	Administrasi keuangan perangkat daerah	Tingkat pemenuhan Dokumen Administrasi Laporan Keuangan Tahunan OPD	Dinas Perkim	100%	3,558,890,113	APDB	Dinas Perakim	100%	3,558,890,113
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perkim	30 orang/bulan	3,265,130,113	APDB		25 Orang	3,265,130,113
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Perkim	30 dokumen	293,760,000	APDB		25 Dokumen	293,760,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perkantoran	Dinas Perkim	100%	482,493,200	APDB	Dinas Perakim	100%	482,493,200
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bnagunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan	Dinas Perkim	12 Paket	4,465,000	APDB		12 Paket	4,465,000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Dinas Perkim	12 Paket	78,620,000	APDB		12 paket	78,620,000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Dinas Perkim	12 Paket	13,500,000	APDB		12 paket	13,500,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RENCANA KERJA TAHUN 2026				Lokasi	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Dinas Perkim	12 Dokumen	59,026,000	APDB		12 paket	59,026,000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang disediakan	Dinas Perkim	12 Dokumen	30,000,000	APDB		12 Dokumen	30,000,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Perkim	360 Laporan	296,882,200	APDB		360 Laporan	296,882,200

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RENCANA KERJA TAHUN 2026				Lokasi	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Dinas Perkim	100%	14,735,936,000	APBD	Dinas Perakim	100%	14,735,936,000
	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Perkim	12 Laporan	5,000,000	APBD		12 Laporan	5,000,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Dinas Perkim	12 Laporan	12,899,000,000	APBD		12 Laporan	12,899,000,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Dinas Perkim	12 Laporan	1,831,936,000	APBD		12 Laporan	1,831,936,000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan barang Milik Daerah yang dipelihara	Dinas Perkim	100%	651,750,000	APBD	Dinas Perakim	100%	651,750,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan	Dinas Perkim	27 Unit	109,350,000	APBD		27 Unit	109,350,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Dinas Perkim	27 Unit	478,530,000	APBD		27 Unit	478,530,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Dinas Perkim	60 Unit	63,870,000	APBD		60 Unit	63,870,000
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah layak Huni untuk Korban Bencana	Dinas Perkim	100%	167,900,000	APBD	Dinas Perakim	100%	167,900,000
		persentase Rumah layak Huni untuk relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah	Dinas Perkim	100%				100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RENCANA KERJA TAHUN 2026				Lokasi	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersedianya Rumah Layak huni bagi korban bencana	Dinas Perkim	10 Unit	167,900,000	APBD		10 Unit	167,900,000
		Tersedianya Rumah Layak huni bagi relokasi program kabupaten/kota							
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah bagi korban bencana kabupaten/kota yang terbangun		1 Unit Rumah	150,000,000	APBD		1 Unit Rumah	150,000,000
	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah		2 Rumah Tangga	17,900,000			2 Rumah Tangga	17,900,000
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase berkurangnya kawasan permukiman	Dinas Perkim	10%	1,157,700,000	APBD	Dinas Perakim	10%	1,157,700,000
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase peningkatan kualitas kawasan kumuh	Dinas Perkim	100%	1,157,700,000	APBD		100%	1,157,700,000
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki		75 Unit Rumah	1,157,700,000	APBD		75 Unit Rumah	1,157,700,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RENCANA KERJA TAHUN 2026				Lokasi	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Penurunan RTLH di luar Kawasan Kumuh	Dinas Perkim	3%	1,875,100,000	APBD	Dinas Perakim	3%	1,875,100,000
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tidak Layak huni menjadi Rumah Layak huni	Dinas Perkim	150 Unit Rumah	1,875,100,000	APBD		150 Unit Rumah	1,875,100,000
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang diperbaiki	Kab. Tanjab Barat, Tungal Ulu, Semua Kel/desa, Kab. Tanjab Barat, Tungal Ilir, Semua Kel/desa, Kab. Tanjab Barat, Pengabuan, Semua Kel/desa, Kab. Tanjab Barat, Betara, Semua Kel/desa, Kab. Tanjab Barat, Merlung, Semua Kel/desa, Kab. Tanjab Barat, Tebing tinggi, Semua Kel/desa, Kab. Tanjab Barat, Batang Asam, Semua Kel/desa, Kab. Tanjab Barat, Renah Mendaluh, Semua Kel/desa, Kab. Tanjab Barat, Muara Papalik, Semua Kel/desa, Kab. Tanjab Barat, Seberang Kota, Semua Kel/desa, Kab. Tanjab Barat, Bram itam, Semua Kel/desa, Kab. Tanjab Barat, Kuala betara, Semua Kel/desa, Kab. Tanjab Barat, Senyerang, Semua Kel/desa. (1. Perbaiki RTLH di kecamatan Kuala Betara 2. Perbaiki RTLH di kecamatan Pengabuan 3. Perbaiki RTLH di kecamatan Senyerang)	150 Unit Rumah	1,875,100,000	APBD		150 Unit Rumah	1,875,100,000
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	cakupan peningkatan PSU	Dinas Perkim	100%	3,801,123,060	APBD	Dinas Perakim	100%	3,801,123,060
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase penyelenggaraan PSU perumahan	Dinas Perkim	100%	3,801,123,060	APBD		100%	3,801,123,060
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian		1500 Lokasi	3,801,123,060	APBD		1500 Lokasi	3,801,123,060
TOTAL PAGU INDIKATIF)					26,462,342,373				26,462,342,373

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan indikator kinerja sebagaimana telah di tuangkan dalam bab sebelumnya, maka perlu disusun Rencana Kerja dalam bentuk program dan kegiatan yang mendukung dalam pencapaian masing-masing sasaran. Rencana Program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 dikelompokkan sebagai berikut :

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RENCANA TAHUN 2026			
							LOKASI	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
1					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, nilai Akip B		100%	31.450.000,	APDB
1	04	01	2.01	0012	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		7 Laporan	31.450.000,	APDB
1	04	01	2.02		Administrasi keuangan perangkat daerah	Tingkat pemenuhan Dokumen Administrasi Laporan Keuangan Tahunan OPD		100%	3.558.890.113	APDB

1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		30 Orang/Bulan	3.265.130.113	APDB
1	04	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		30 Dokumen	293.760.000	APDB
1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perkantoran	Dinas Perkim	100%	482.493.200,	APDB
1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		12 paket	4.465.000	APDB
1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 paket	78.620.000	APDB
1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 paket	13.500.000	APDB
1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12 dokumen	59.026.000,	APDB
1	04	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12 Dokumen	30.000.000,	APDB
1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		360 Laporan	296.882.200	APDB
1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	Dinas Perkim	100%	14.735.936.000	APBD
1	04	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	5.000.000	APBD
1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	12.899.000.000	APBD
1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	1.831.936.000	APBD
1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan barang Milik Daerah yang dipelihara	Dinas Perkim	100%	651.750.000	APBD
1	04	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		27 Unit	109.350.000,	APBD

1	04	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		27 Unit	478.530.000,	APBD
1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		60 Unit	63.870.000	APBD
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah layak Huni untuk Korban Bencana	Dinas Perkim	100%	167.900.000	APBD
						persentase Rumah layak Huni untuk relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah	Dinas Perkim	100%		
1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah KorbanBencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersedianya Rumah Layak huni bagi korban bencana	Dinas Perkim	10 Unit Rumah	167.900.000	APBD
						,Tersedianya Rumah Layak huni bagi relokasi program kabupaten/kota				
1	04	02	2.03	0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	13 Kecamatan	1 Unit	150.000.000	APBD
1	04	02	2.03	0007	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah		2 Rumah Tangga	7.900.000	
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase berkurannya kawasan permukiman kumuh	Dinas Perkim	10%	1.157.700.000,	APBD
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan PermukimanKumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase peningkatan kualitas kawasan kumuh	Dinas Perkim	10%	1.157.700.000,	
1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	13 Kecamatan	75 Unit Rumah	1.157.700.000,	APBD
1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASANPERMUKIMAN KUMUH	Persentase Penurunan RTLH di luar Kawasan Kumuh	Dinas Perkim	3%	1.875.100.000	
1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan KawasanPermukiman Kumuh pada DaerahKabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tidak Layak huni menjadi Rumah Layak huni	Dinas Perkim	150 unit	1.875.100.000	

1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	13 kecamatan	150 unit rumah	1.875.100.000	APBD
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANADAN UTILITAS UMUM (PSU)	cakupan peningkatan PSU	Dinas Perkim	100%	3.801.123.060,	
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase penyelenggaraan PSU perumahan	Dinas Perkim	100%	3.801.123.060,	
1	04	05	2.01	0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	13 Kecamatan	1500 Lokasi	3.801.123.060,	
									26.462.342.373	

**BAB V
PENUTUP**

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang berlandaskan Rencana Strategis Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 - 2029 dan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 - 2029.

Rancangan Awal Rencana Kerja ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan tahun 2026.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 ini semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Tanjab Barat Tahun 2026.

Kuala Tungkal, 30 Desember 2025

KEPALA DINAS
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



H. SYAFRUN, ST
Pembina Tingkat I/IV b
NIP. 19821126 201001 1 015